

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dinamika yang terjadi di bumi ini merupakan sebuah keniscayaan. Seiring berjalannya waktu dunia terus mengalami berbagai perubahan. Pendidikan dalam hal ini menjadi salah satu wadah dalam melakukan transformasi baik secara nilai, etika maupun teknologi yang kini tengah menjadi sumber utama untuk tetap bertahan dalam berbagai bentuk dinamika yang ada. Naziev (2016) menyatakan bahwasanya pendidikan sendiri adalah proses yang diatur secara sosial untuk memberikan pengalaman kepada generasi muda yang bersumber dari generasi sebelumnya. Winataputra (2001) menambahkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang mencakup berbagai dimensi yang melekat padanya menjadi salah satu bidang kajian ilmu yang dapat menyentuh berbagai fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara general memiliki misi guna mencetak warga negara yang “*smart and good citizen*” atau dengan kata lain yaitu warga negara yang cerdas dalam berwawasan, serta cerdas dalam menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan tentunya dengan tetap memiliki karakter yang baik. Amanah yang diberikan terhadap bidang disiplin ilmu PKn bertalian erat dengan pembentukan karakter bangsa. PKn dalam mengaktualisasikan fungsinya tentu harus beriringan dengan fungsi pendidikan secara general, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwasannya salah satu fungsi dari pendidikan nasional adalah membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Wahab dan Sapriya (2011:312) menyatakan bahwa PKn secara spesifik memiliki tujuan yakni agar peserta didik memiliki kemampuan diantaranya (1) Ilmu Pengetahuan, tentunya mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (2) Keterampilan intelektual, yang harus mampu dikemas menjadi lebih baik, keterampilan sederhana hingga keterampilan kompleks, dari penyelidikan hingga kesimpulan yang sah, dari berpikir kritis hingga berpikir kreatif; (3) Sikap, yang meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan; serta (4)

Keterampilan sosial. Tujuan yang disampaikan tersebut tentunya telah bersifat masif karena sudah mencakup seluruh keterampilan baik di dalam maupun di luar kelas atau dengan kata lain mampu diaktualisasikan secara teoretis dan praksis.

Secara epistemologis, menurut Winataputra (2001; 2016) PKn dapat apabila ditinjau berdasarkan struktur dan logika internal keilmuannya adalah suatu sistem pengetahuan terpadu (*integrated knowledge system*). Sistem pengetahuan terpadu tentunya harus difungsikan sebagai wahana pendidikan demokrasi yang di dalamnya mencakup tiga dimensi yaitu konseptual, interaktif serta holistik. Ketiga dimensi tersebut diejawantahkan kembali menjadi beberapa hal yaitu berupa kajian keilmuan (*research and development*) kewarganegaraan; instrumen kurikuler kewarganegaraan misalnya dalam bentuk kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dikemas dalam pendidikan formal maupun informal; serta praksis kewarganegaraan yang diaktualisasikan dalam aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan secara individu maupun kelompok dalam sebuah komunitas.

Merujuk pada penjelasan di atas, kembali mengisyaratkan bahwasannya PKn tidak hanya berpusat pada pendidikan secara formal saja tetapi harus pula turut berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang diaktualisasikan dalam berbagai bentuk program maupun kegiatan yang berorientasi pada pembinaan karakter. Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Clark dalam (Aryani, I.K. & Susatim, M. 2010: 46) yang menyatakan bahwa:

Titik berat Pendidikan Kewarganegaraan adalah perkembangan individu yang dapat memahami lingkungan sosialnya, serta manusia dengan kegiatan dan interaksi antara mereka. Anak didik diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan dapat memberikan andil dalam masyarakat, mempunyai tanggung jawab, tolong-menolong dengan sesama, dan dapat mengembangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwasannya teori yang dipelajari dalam pendidikan formal hendaknya dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan agar dapat membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) itu sendiri. Dalam mengejawantahkan PKn pada kehidupan bermasyarakat, tentunya *community civic* dapat dijadikan sebagai instrumen sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Kardiman, Y dalam (Widyastuti & Nugraha, 2017:146) menyatakan

bahwasanya terdapat dua hal yang urgen dalam PKn yakni perkembangan PKn dalam ruang lingkup di persekolahan agar dapat mencetak warga negara muda agar dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat serta PKn dalam ruang lingkup masyarakat yang harus dikembangkan melalui *community civic*.

Pendapat tersebut bermakna bahwasannya porsi dari Pendidikan Kewarganegaraan harus seimbang antara pengajaran yang dilaksanakan di kelas serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat melalui *community civic*. Merujuk pada *historical background perspective*, PKn Kemasyarakatan atau *community civics* lahir dan bertujuan untuk lebih memfungsikan *civics*. Gerakan ini diprakarsai oleh W.A. Dunn pada tahun 1907 agar *civics* tidak melulu bicara perihal pendidikan yang mempelajari konstitusi dan pemerintah saja namun lebih dari pada itu guna menghadapi pada realitas kehidupan sehari-hari (Van, Good dalam Syaifullah, 2015). Berdasarkan pada gagasan tersebut, dapat dimaknai bahwasannya PKn Kemasyarakatan di dalamnya memiliki cakupan terkait dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas dan senantiasa bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Tolbert, dkk dalam (Lee & Thomas, 2010:120) yang menyatakan bahwasannya :

Community civic scholars focus on the interplay between residential stability, the civic participation of community residents, the civic institutions facilitating civic engagement, and the degree to which the immediate business climate is locally oriented.

Fokus dari *community civic* ada pada interaksi antara partisipasi warga negara, keterlibatan warga negara, serta sejauh mana keterlibatan pemerintah serta bagaimana mewujudkan usaha yang memanfaatkan kekayaan lokal. Pada hakikatnya, keberadaan komunitas dalam sebuah masyarakat merupakan bentuk konkret bahwasannya manusia adalah makhluk sosial. Menurut Robert Putnam (2001) menyatakan *community civic* memiliki sebuah ciri yakni kental akan proses asosiasi serta terjadi sebuah kolaborasi secara efektif. *Community civic* menekankan pada bentuk cara yang dapat diimplementasikan oleh warga negara melalui interaksi sosial sehingga akan dapat mengatasi segala bentuk problematika yang akan dihadapi ke depannya.

Konsep yang cukup krusial terkait dengan PKN kemasyarakatan adalah berkenaan dengan keterlibatan warga negara (*civic engagement*). Gagasan terkait dengan *civic engagement* selaras dengan misi PKN sendiri yang secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait mata kuliah PKN yang memiliki tujuan yang jelas yakni membuat program pendidikan demokrasi. Pendapat Nugroho (2015) menjelaskan bahwasanya strata tertinggi yang dapat diterima oleh banyak negara adalah demokrasi. Demokrasi dianggap menjadi sebuah sistem yang dapat menjadi alternatif yang mampu digunakan untuk menata dan menuntaskan hubungan sosial dan politik, yang terjalin baik antar perseorangan, kelompok maupun antar negara di dunia. Dengan demikian, demokrasi sebagai suatu sistem tentunya harus tetap memiliki elemen yang mampu menjadi penunjang keberlangsungan sistem tersebut.

Winataputra&Budimansyah (2012) menyatakan bahwa salah satu komponen penunjang dalam keberlangsungan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara. Partisipasi warga negara dalam bingkai demokrasi menjadi suatu hal yang krusial dan menjadi tujuan akhir dari PKN. Bahkan menurut Branson dalam (Mulyono, 2017) menuturkan salah satu kecakapan warga negara selain kecakapan intelektual (*intellectual skills*) adalah kecakapan partisipasi (*participation skills*). Keterampilan sebagai warga negara dalam bingkai kecakapan partisipasi dapat diejawantahkan dalam bentuk partisipasi secara efektif di masyarakat.

Warga negara yang aktif oleh Hoskins & Mascherini (2009:6) di definisikan sebagai berikut :

This definition of Active Citizenship includes a broad variety of participatory activities. It ranges from participatory democracy, including actions that hold governments accountable, to representative democracy, including actions such as voting, and also to participation in the everyday life of the communities. The definition is inclusive towards new forms of Active Citizenship such as one-off issue politics and responsible

Konsep tersebut menunjukkan bahwasannya warga negara yang aktif merupakan mereka yang dapat berkontribusi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Gagasan terkait warga negara aktif (*active citizenship*) menyoroti konsep partisipasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil digambarkan sebagai gabungan dari institusi, organisasi, dan seseorang yang terwalak dalam sebuah

keluarga, negara bagian, dan tempat orang-orang bergaul secara sukarela untuk memajukan kepentingan bersama. Oleh karena itu, PKn merupakan suatu disiplin ilmu yang menyoroti perihal partisipasi aktif dari warga negara.

Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) menurut Mr. Guido Bertucci (2007:35) dalam buku yang berjudul *Civic engagement in Public Policies: A Toolkit* menyatakan sebagai berikut :

Civic engagement is individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern. Civic engagement can take many forms, from individual volunteerism to organizational involvement to electoral participation. It can include efforts to directly address an issue, work with others in a community to solve a problem or interact with the institutions of representative democracy.

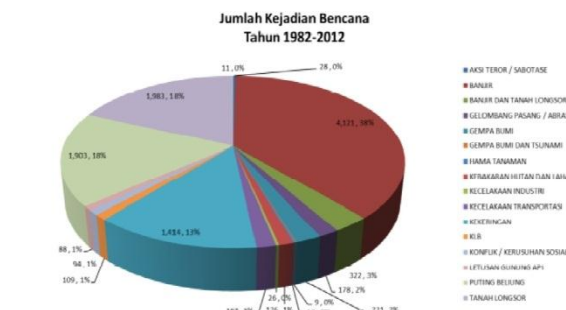
Merujuk pada pengertian di atas, menjelaskan bahwasannya keterlibatan warga negara adalah tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif yang dicetuskan dengan tujuan untuk mengenali dan mengatasi problematika yang tengah menjadi sorotan. Keterlibatan warga negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesukarelaan individu hingga keterlibatan organisasi hingga partisipasi pemilu. Ini dapat mencakup upaya untuk secara langsung menangani suatu masalah, bekerja dengan orang lain dalam komunitas untuk memecahkan masalah atau berinteraksi dengan lembaga demokrasi perwakilan.

Jenis keterlibatan warga negara menurut Welch (2007) kerap kali dikenal dengan *service learning*. Berbagai bentuk kegiatan yang tergolong ke dalam bentuk keterlibatan warga negara di antaranya adalah menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, memberikan pengabdian kepada masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam aksi-aksi sosial guna mengurangi segala bentuk permasalahan yang mencuat. Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dalam dimensi praktik tentunya hadir guna turut membantu berbagai problematika yang kian eksis di masyarakat.

Problematika yang terjadi tentunya memerlukan keterlibatan warga negara (*civic engagement*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial warga negara. Terlebih Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang kerap kali dilanda bencana. Posisi Indonesia terletak di garis Khatulistiwa serta berbentuk kepulauan, hal tersebut menyebabkan Indonesia berpotensi tinggi untuk

terjadi berbagai bencana terkait hidrometeorologi. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan potret kejadian bencana alam yang pernah melanda Indonesia.

Gambar 1. 1 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 1982-2012

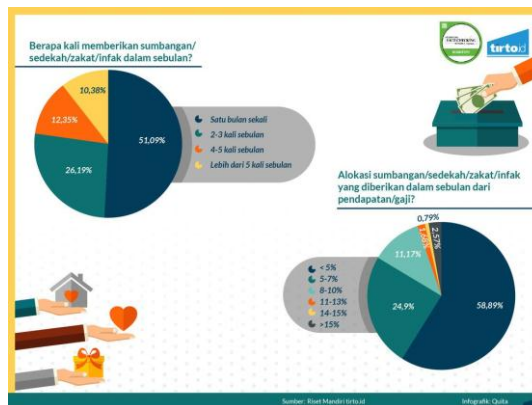


Sumber : Buku Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019

Merujuk pada data bencana yang dikumpulkan oleh Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (2014), bencana yang terjadi pada kurun waktu 30 tahun terakhir (1982-2012) menunjukkan bahwa terjadi 4.211 bencana banjir, sebanyak 1.903 terjadi angin puting beliung, 1.414 terjadi bencana kekeringan, serta 1.397 kejadian bencana alam lainnya hingga apabila dihimpun menjadi 10.817 kejadian (BNPB, 2014). Fakta empiris tersebut mengisyaratkan bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang kerap kali dilanda bencana alam. Begitupun dengan masalah-masalah sosial yang terjadi seperti kemiskinan yang berdasarkan pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mengungkapkan persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,41%.

Permasalahan yang eksis di permukaan tersebut tentunya memerlukan adanya bentuk partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu bentuk peran aktif warga negara adalah dengan melakukan donasi atau dengan berkontribusi secara langsung untuk memberikan bantuan. Namun, minat masyarakat dalam memberikan donasi cenderung masih sedikit. Berikut gambar yang menunjukkan presentase berdonasi di kalangan milenial.

Gambar 1. 2 Presentase berdonasi generasi millennial.



Sumber. <https://tirto.id/generasi-milenial-suka-memberi-sumbangan-cLHu>

Merujuk kepada survei yang dilakukan oleh Tirto pada tahun 2018 yang melakukan penelitian untuk meninjau sejauh mana tingkat kepedulian masyarakat menyatakan bahwasannya 51,09% milenial Indonesia dalam sebulan hanya satu kali memberikan sumbangan/sedekat/zakat/infak kepada yang membutuhkan. Kemudian 10,38% lebih dari 5 kali milenial Indonesia memberikan sumbangan dalam sebulan. Di samping itu, untuk konteks alokasi pendapatan atau gaji terhadap nilai sumbangan menyatakan bahwasannya hanya kurang dari 5% dari pendapatan mereka diberikan untuk berdonasi bagi 5,9% milenial. Kemudian sebanyak 24,9% menyatakan bahwasannya mereka mengalokasikan dana untuk sumbangan sebanyak 5-7%. Serta hanya 2.57% yang mengalokasikan dana mereka lebih dari 15 % per bulan dari pendapatannya.

Bentuk transformasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam berdonasi adalah dengan memanfaatkan media sosial yaitu dengan melakukan penggalangan dana secara *online (platform crowdfunding)*. Berasal dari kata ‘*crowd*’ yang bermakna ramai serta ‘*funding*’ yang bermakna pendanaan, atau dapat pula dimaknai bahwasanya *crowdfunding* adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan dana secara patungan (Herna et al., 2019). Konsep *crowdfunding* sudah cukup di kenal di kalangan masyarakat. *Crowdfunding* sendiri memiliki etika moralitas yang sejalan dengan budaya Indonesia yaitu nilai gotong royong dalam membantu orang lain. Salah satu situs *crowdfunding* terbesar di Indonesia adalah Kitabisa.com. *Platform Crowdfunding* Kitabisa.com mampu mengumpulkan dana lebih dari Rp.450 miliar selama 5 tahun belakangan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam hingga bantuan

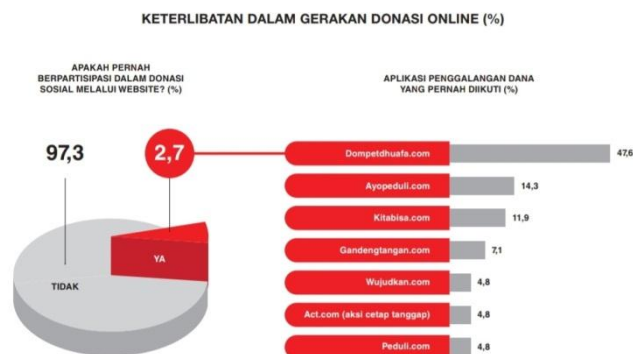
Sandra Tresnayadi, 2021

PENGARUH CELEBRITY ENDORSER TERHADAP MINAT BERDONASI ONLINE SEBAGAI BENTUK CAPAIAN KEGIATAN PKN KEMASYARAKATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kemanusiaan untuk Palestina. Berikut grafik yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan donasi *online*.

Gambar 1. 3 Keterlibatan Masyarakat dalam gerakan donasi *online*.



Sumber. Indonesia Millennial Report Tahun 2019

Data yang telah dihimpun oleh *Indonesia Millennial Report* tahun 2019 menunjukkan 2,7% millennial Indonesia terlibat dalam penggalangan dana secara *online*. Dari berbagai *platform* penggalangan dana secara *online*, Dompethuafa.com adalah salah satu *crowdfunding* yang dinilai paling dikenal dengan tingkat *awareness* sebesar 47,6 %, kemudian diikuti oleh Ayopeduli.com dengan 14,3%, dan Kitabisa.com dengan 11,9% (IDN Research, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya *platform* yang bergerak untuk mengumpulkan donasi secara *online* dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan minat berdonasi masyarakat.

Strategi yang dewasa ini kerap kali digunakan oleh *platform crowdfunding* (donasi *online*) adalah dengan penggunaan *celebrity endorser*. Menurut Zhang, (2010) *celebrity endorser* merupakan orang-orang yang dikenal publik karena prestasinya. Mengutip McCracken (1989:310) “...*Celebrity endorser is a person who enjoys the public recognition and who uses this recognition in the name of goods while appearing with this one in advertising*”. Pendapat tersebut memiliki makna bahwa *celebrity endorser* adalah bentuk iklan yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan pengakuan dari publik serta memanfaatkannya dalam mempromosikan suatu barang maupun jasa. Ohanian (1990) mengungkapkan bahwasanya kriteria yang harus dimiliki *celebrity endorser* yaitu memiliki kredibilitas agar mendapatkan perhatian publik. Pernyataan tersebut didukung oleh Erdogan et al (2001) yang mengungkapkan bahwa informasi yang

disampaikan oleh seseorang yang memiliki kredibilitas tinggi dianggap lebih mampu memengaruhi khalayak sehingga mampu mencapai proses internalisasi yang ditunjukkan melalui tingkat kepercayaan, sikap dan perilaku hingga opini. Hal tersebut pun selaras dengan teori *Elaboration Likelihood Model* (ELM). Teori ini berasal dari tradisi sosiopsikologis, didalamnya mengkaji mengenai perilaku sosial individu, kepribadian dan sifat, persepsi dan kognisi, variabel psikologis dan efek pada individu (Littlejohn & Foss, 2009). Teori yang dikembangkan oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo ini menjelaskan bagaimana individu menerima dan mengolah pesan tertentu kemudian memprosesnya hingga menimbulkan perubahan sikap (Lien, dalam Permana, 2017).

Banyak penelitian yang pernah melibatkan penggunaan *celebrity endorser* dan dilihat sejauh mana pengaruhnya. Namun tentunya hanya terbatas dimensi kajian masing-masing. Penelitian yang juga membahas terkait *celebrity endorser* diantaranya adalah yang dilakukan oleh Vincent dkk (2008) yang menyatakan bahwasannya kriteria dari *celebrity endorser* harus mampu merepresentasikan suatu layanan atau barang yang mereka promosikan agar dapat dinilai (Magnini et al., 2008). Selain itu, Glennardo (2018) pernah melakukan penelitian yang menyatakan endorser SLANK memiliki pengaruh positif terhadap minat berdonasi masyarakat pada Profauna sebesar 15% dengan dimensi *celebrity endorser* paling dominan. Sementara penelitian terkait dengan *platform crowdfunding* atau berdonasi secara *online* masih terbatas penelitian yang mengkaji mengenai mekanisme dari sisi sistem aplikasi data penerapan (Gunarsa, 2012). Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Davies (2014) dengan fokusnya hanya pada pengembangan *crowdfunding donation based* bernama *Civic Crowdfunding* serta faktor keberhasilan dari sebuah kampanye *crowdfunding* (Willems, 2013) saja.

Dengan demikian, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian guna mengkaji pengaruh *celebrity endorser* dalam meningkatkan minat berdonasi *online* lewat *Platform Crowdfunding* sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk dapat berperan sebagai bentuk PKn Kemasyarakatan. Sehingga capaian kegiatan PKn Kemasyarakatan berupa *civic engagement* atau potret keterlibatan warga negara menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan masyarakat. Dengan

memfokuskan studi pada mereka masyarakat yang mengetahui kegiatan donasi *online* melalui *platform crowdfunding* yang menggunakan *celebrity endorser* dalam upaya meningkatkan minat berdonasi *online* masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul “Pengaruh *celebrity endorser* terhadap Minat Berdonasi *Online* sebagai Bentuk Capaian Kegiatan PKn Kemasyarakatan”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas, merujuk kepada rumusan masalah secara umum yaitu: “Bagaimana pengaruh *celebrity endorser* terhadap Minat Berdonasi *Online* sebagai bentuk PKn Kemasyarakatan Masyarakat?”. Tentunya agar penelitian ini lebih terorganisir, maka fokustrasi masalah di atas akan dikemas menjadi lebih rinci sehingga menciptakan beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pengaruh *celebrity endorser* dalam mendukung kegiatan PKn Kemasyarakatan ?
2. Bagaimana pengaruh *celebrity endorser* terhadap minat berdonasi *online* masyarakat?
3. Bagaimana hubungan *antara celebrity endorser* dengan minat berdonasi *online* masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1. Tujuan Umum.

Tujuan umum dari adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari *celebrity endorser* dalam meningkatkan minat berdonasi *online* sebagai salah satu bentuk capaian kegiatan PKn Kemasyarakatan.

2. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh *celebrity endorser* dalam mendukung kegiatan PKn Kemasyarakatan.

- b. Mengetahui pengaruh *celebrity endorser* terhadap minat berdonasi *online* masyarakat.
- c. Mendeskripsikan hubungan antara *celebrity endorser* dengan minat berdonasi *online* masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari Segi Teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atas pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain sosio-kultural.
- b. Mengenalkan bentuk capaian kegiatan dari PKn Kemasyarakatan sebagai salah satu bentuk domain sosio-kultural.

2. Manfaat dari Segi Praktik

- a. Bagi Peneliti
Meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis fenomena merebaknya *celebrity endoser* yang dijadikan sebagai strategi untuk meningkatkan minat berdonasi *online* masyarakat.
- b. Bagi Institusi/Program Studi.
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan mengenai salah satu bentuk capaian dari kegiatan PKn Kemasyarakatan sebagai salah satu domain dalam *Civic Education*.
 - 2) Sebagai masukan untuk pengembangan penelitian terkait dengan PKn Kemasyarakatan.
 - 3) Sebagai sarana pembinaan karakter yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

- a. Pemanfaatan *celebrity endorser* apabila memang terbukti efektif dapat dijadikan sebagai strategi ampuh untuk menarik minat masyarakat dala berbagai program yang positif.
- b. Kegiatan Berdonasi *Online* sebagai salah satu bentuk capaian kegiatan PKn Kemasyarakatan dapat membina karakter warga negara sebagai misi dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) itu sendiri.

- c. Diharapkan dapat menghimpun banyak masyarakat agar dapat melakukan donasi secara *online* sebagai wujud partisipasi serta keterlibatannya sebagai warga negara dalam menghadapi berbagai bentuk problematika yang ada.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang teori yang relevan yang sedang dikaji dalam kedudukan masalah penelitian terkait bidang ilmu yang diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep terkait dengan *Celebrity Endoser* serta Indikatornya, Minat Berdonasi *Online* sebagai Bentuk Capaian Kegiatan PKn Kemasyarakatan, PKn Kemasyarakatan serta indikatornya disertai dengan kerangka pemikiran dan penelitian yang relevan.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian termasuk beberapa komponen seperti desain penelitian, responden, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

5. Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan dan implikasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.